

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi dalam banyak hal merupakan cita-cita negara karena pelaksanaan sistem demokrasi ditujukan untuk mencapai kedaulatan di tangan rakyat, secara konstitusional Indonesia menganut sistem demokrasi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Hakikat demokrasi adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu menjadi sarana menghadirkan representasi politik masyarakat ke dalam panggung politik melalui partai dan wakil-wakil yang terpilih.

Pada kehidupan di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik menjadi sebuah wadah yang terorganisir secara rapih dan stabil dengan didorongnya kesepahaman secara ideologi dan paham pemikiran, partai politik ada dimasyarakat karena merupakan hasil dari pemanduan dari berbagai kepentingan-kepentingan masyarakat, dengan begitu partai politik memiliki tujuan yaitu untuk mempertahankan kursi kekuasaannya demi menjalankan gagasan dan tujuan partai yang dihadapi melalui pemilihan umum atau pemilu legislatif.¹

¹ Elly M. Setiadi Dan Kolip Usman, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) Hal. 277-278.

Sebagai partai politik yang telah lama berkecimpung dalam kegiatan pemilihan umum, PPP pasti akan mengalami pasang surut jumlah pemilih pada pemilihan umum sebelumnya, tingkat perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh perilaku pemilih, ada pemilih yang secara bulat memilih partai politik tertentu pada setiap pemilihan, dan ada pula pemilih yang tidak konsisten sehingga memilih partai politik yang berbeda pada setiap pemilihan.

Indonesia melaksanakan pemilu langsung untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi, dan penyelenggaraan pemilu yang aman dan demokratis tentu bukan salah satu tolok ukur terwujudnya kualitas demokrasi di daerah. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, berbagai indikator dan faktor harus terus dibangun, terutama terkait dengan peran dan fungsi partai politik sebagai alat perjuangan.²

Gejala pergeseran loyalitas pemilih menjadi sebuah fenomena yang sebenarnya dapat menyebabkan ketidakpastian dalam sistem kepartaian, gejala ini menjadi suatu parasit yang juga timbul dalam sistem partai di banyak negara yang dapat disebabkan karena banyak munculnya jumlah partai yang memiliki sebuah ideologi atau gagasan yang sama dengan serta adanya perubahan referensi pemilih terhadap partai politik mulai bervariasi dan mulai berubah-ubah terhadap keputusannya.

² Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal. 23-24.

Pergeseran suara menjadi hal yang wajar terjadi pada pada pemilu, selain karena dinamika perubahan masyarakat, persoalan keterwakilan atau representasi menjadi konsep problematik didalam pandangan masyarakat. Perbedaan pandangan yang sesuai prinsip tidak pernah menemukan kesepakatan. Desain sistem pemilu bisa dipakai untuk menjalankan dan mewujudkan pemilu sebagai fungsi representasi (keterwakilan), integrasi, atau fungsi mayoritas (governability).³

Momentum hajatan lima tahunan ini memang selalu menjadi sensasi dan mewarnai hari hari sejarah Indonesia. Pemilihan menjadi hal yang sangat penting karena akan dapat menentukan masa depan bangsa dan negara dengan memilih siapa yang layak untuk dapat memimpin wilayah hidupnya, momentum ini menjadi proses yang sangat krusial, dimana keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu akan menentukan juga keadaan Indonesia kedepan, maksudnya, jika proses pemilihan tidak berjalan dengan baik, maka akan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak baik dan bukan pilihan rakyat yang sebenarnya.

Untuk itu perlu adanya sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh DPC PPP didalam menyiapkan strategi khusus untuk pemilu legislatif 2019 dengan memanfaatkan kantong-kantong suara di daerah basis PPP yang berada dilingkup kehidupan politik masyarakat Kota Bogor, dengan begitu seluruh jajaran kepengurusan DPC PPP Kota Bogor harus mengkonsepkan secara utuh strategi

³ Aurel Croissant, Election Politics In Southeast And East Asia, (Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002)

partai yang akan dibawa dan ditunjukkan kepada masyarakat pemilih untuk dapat meraih kepercayaan masyarakat terhadap PPP.

Dinamika yang terjadi pada Pemilihan Legislatif di daerah-daerah tersebut jelas bahwa masing-masing partai politik memiliki basis pemilih yang berbeda. Pengaruh perilaku pemilih dan tingkat perubahan suara pemilih pada pemilu dapat mencerminkan sebuah perubahan yang dramatis yang dapat membuat sulitnya penentuan kepemimpinan yang baru, hal tersebut juga berdasarkan rekam jejaknya yang dikaitkan dengan ketidak stabilan pembangunan ekonomi, kasus korupsi dan aksi respon dari pihak pemerintah sebelumnya.

Pergeseran suara partai politik yang dihasilkan dari kontestasi politik berupa Pemilu Legislatif itu amat sangat nyata adanya, peristiwa pergeseran suara dari pemilih itu akan ada dan terus terjadi dalam pemilihan apapun, hal tersebut tidak terlepas dari perilaku pemilih sendiri yang telah menilai pilihannya berdasarkan pengamatan politiknya. Pergeseran suara pemilih tersebut bisa terjadi karena dapat dipastikan terdapat beberapa faktor yang membuat pemilih itu sendiri berganti pilihan yang pernah dia pilih ke pilihan lain karena beberapa pertimbangan juga yang dibuatnya.

Tingkat perubahan suara pemilih ini dapat menjadi tinggi apabila kondisi ini cenderung dapat dipahami, karena kesetiaan dari pemilih yang tidak menentu, dan mengakibatkan sistem dari partai tersebut juga menjadi tidak jelas sehingga pemilih akan lebih mempercayai elit partainya daripada partai itu sendiri sehingga

hal itu menggambarkan realitas demokrasi dalam jumlah perolehan suara dari sebuah kegiatan pemilihan umum.

Sebagai partai yang sudah lama mengikuti kegiatan pemilihan umum PPP tentu telah mengalami pasang surut suara pemilih pada setiap pemilihan umum yang sudah di lewati, hal ini tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan suara PPP selalu mengalami pasang surut dalam setiap pemilu/pemilihan legislatif baik di tingkat pusat atau pada tingkat daerah. Untuk itu perlu adanya sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh DPC PPP di dalam menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Pemilihan Umum Legislatif.

Pemilu Legislatif tingkat II atau setara dengan Kab/Kota merupakan salah satu rangkaian dari adanya kegiatan Pemilihan Umum nasional yang diselenggarakan dalam 5 tahun sekali. Pemilu Indonesia pasca reformasi memiliki dua ciri utama, yang pertama adalah dinamika perubahan jumlah pemilih di tingkat pusat dan daerah, dan yang lainnya adalah suara yang sangat berfluktuasi di setiap pemilu. Fenomena di era reformasi, kekecewaan publik terhadap partai-partai yang marak dengan sikap apatis dan golput pada pemilu 1999-2009 telah menggeser partisipasi politik dan pilihan politik pada pemilu 2014 dan 2019 kepada partai-partai yang diyakini membawa harapan dan persepsi yang meningkat tentang isu-isu politik.

Seperti halnya pada pemilu legislatif 2014, pada tahun 2014 PPP Kota Bogor menjadi bagian daripada peserta pemilu pada tahun tersebut, pemilu legislatif telah menjadi kegiatan dari PPP yang sudah kesekian kalinya diikuti semenjak partai ini berdiri, PPP mengambil bagian daripada pemilu legislatif ini adalah untuk menjalankan tujuan dari adanya partai politik di Indonesia khususnya, dalam pemilu legislatif di Kota Bogor juga, PPP tidak hanya sendirian yang menjadi peserta pemilu legislatif 2014 yang memiliki background keagamaan dalam partainya.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, DPRD Kota Bogor tersedia bangku kepengurusan sebanyak 45 kursi yang disediakan untuk para calon pengurus Legislatif yang baru, kemudian pada Pemilu Legislatif 2019 yang dilakukan secara serentak, ketersediaan bangku Legislatif DPRD Kota Bogor bertambah 5 slot kursi untuk menampung calon kepengurusan, dengan itu pada tahun 2019 DPRD Kota Bogor tersedia 50 kursi kepengurusan Legislatif DPRD tingkat II atau setara dengan tingkat kota.

Sama halnya dengan pemilihan-pemilihan lainnya, pada tahun 2019 juga terdapat ajang pemilihan yang dilakukan serentak oleh penyelenggara pemilu berdasarkan putusan MK tahun 2013 tentang adanya pemilihan secara serentak, pemilihan ditahun ini menjadi pemilihan yang dilihat menjadi meriah karena dilakukannya secara berbarengan dihari yang sama dan waktu yang bersamaan pula, pada pemilu tahun ini juga tidak hanya memilih satu kategori pemilu saja, ditahun ini juga dilakukannya pemilihan wakil-wakil untuk daerah juga, termasuk dalam hal ini kepada daerah di Bogor.

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Legislatif Kota Bogor

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPRD	
		2014	2019	2014	2019
1	PDI-Perjuangan	92.673	84.774	8	8
2	Golkar	71.246	57.496	6	5
3	Gerindra	56.686	99.090	6	8
4	Demokrat	47.083	39.825	5	5
5	PKS	56.732	103.890	5	10
6	PPP	47.325	36.783	5	5
7	Hanura	24.916	23.845	4	1
8	PAN	19.458	37.338	3	3
9	PKB	4.899	33.400	1	3
10	Nasdem	8.611	19.304	1	1
11	PBB	8.209	12.312	1	1

Data: <https://kpu-bogorkota.go.id/index.php/arsip>

Berdasarkan kepada gambar hasil Pemilu Legislatif di Kota Bogor pada tahun 2014 dan 2019 tersebut menafsirkan adanya pergeseran perolehan suara partai dalam Pemilu Legislatif dari pemilih, dari data tersebut dapat dijelaskan juga pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Bogor bahwasannya Partai Persatuan Pembangunan menjadi partai dalam urutan keenam dengan perolehan suara pemilih terbanyak yang dihasilkan dari kegiatan Pemilu dengan torehan suara pemilih sebesar 47.325 jiwa pemilih dari total jumlah populasi Kota Bogor pada tahun itu, dari perolehan hasil tersebut, PPP menempati posisi keenam juga dalam pengalokasian kader-kader partai kedalam kalkulasi kursi Legislatif DPRD Kota Bogor dengan jumlah 6 kursi parlemen dari total 45 kursi pada tahun 2014.

Namun hal tersebut berubah pada perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi Pemilu Legislatif tingkat II yang setara Kab/Kota, pada tahun 2019 dalam kontestasi Pemilu Legislatif di Kota Bogor terdapat perbedaan atas perolehan suara pemilih daripada PPP di Kota Bogor, pada Pemilu Legislatif 2019, PPP menjadi partai politik dalam urutan ketujuh dari sebelas partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif terbanyak dengan perolehan suara pemilih 36.783 jiwa pemilih, dengan perolehan suara partai politik sebanyak itu, dalam susunan Legislatif DPRD Kota Bogor, PPP berhasil mempertahankan jumlah pengalokasian kader-kader partai kedalam struktural DPRD Kota Bogor sebanyak 5 kursi dari total jumlah 50 kursi DPRD Kota Bogor pada tahun 2019, perbedaan perolehan suara tersebut pada tahun 2014 dan 2019, diperkirakan Partai Persatuan Pembangunan mengalami selisih perolehan suara pemilih pada Pemilu Legislatif sebesar 5-6%.

Dari adanya pergeseran suara pemilih yang dialami oleh PPP Kota Bogor tersebut, tidak luput dari adanya perilaku pemilih yang telah dihadapkn kepada Partai Persatuan Pembangunan terhadap Pemilu Legislatif.⁴ Dalam hal ini perilaku pemilih memiliki pengaruh yang sangat besar bagi nasib PPP dalam menghadapi Pemilu Legislatif, dari hasil tersebut juga pada persiapan menghadapi ajang pemilihan umum, strategi merketing kampanye dan komunikasi politik partai politik menjadi suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh partai politik khususnya, karena dari pola tersebut menjadi acuan dan gambaran dari masyarakat

⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 461

pemilih dalam menentukan pilihannya, karena dalam lingkup politik, lama atau pendeknya hidup suatu partai dapat ditentukan oleh keputusan memilih dari masyarakat.

Dari hal tersebut, secara kuasa dan hak, rakyat menentukan untuk menentukan pilihan rasionnya yang akan dipilih dalam Pemilu Legislatif, karena masyarakat akan melihat secara objektif dari strategi kampanye atau marketing partai politik untuk dapat mewujudkan keinginan dan harapan dari masyarakat pemilih. Hal tersebut tidak terlepas dari strategi partai yang dicanangkan oleh partai untuk meraup suara dari basis pemilih di masyarakat.⁵

Perilaku politik itu dilihat sebagai sebuah alat analisis untuk melihat bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum tersebut, baik itu melalui penggunaan hak pilih politik, keikutsertaan seseorang dalam kampanye seperti mengikuti sosialisasi dengan menyampaikan janji-janji politik oleh partai politik yang dilakukan dilingkungan masyarakat, dan keanggotaan seseorang dalam partai politik juga dapat mempengaruhi masyarakat disekitar untuk berpartisipasi pada pemilihan umum Legislatif (DPRD).

Kuatnya perilaku pemilih dalam pemilihan umum secara sosiologis, psikologis dan rasionalis membuat atmosfer dari dalam tubuh partai politik dan lingkungan masyarakat menjadi terasa berkelas, karena secara perkembangan zaman politik seperti saat ini sudah sedikitnya tidak bersikap apatis terhadap subjek

⁵ Mochammad Rifqi Ridho, Strategi Komunikasi Politik Dalam Perolehan Suara (Ppp) Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Tegal, (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Hal. 1.

dan objek pemilihan umum, sehingga dengan perilaku pemilih yang seperti itu menjadi memungkinkan hasil dari pemilu partai politik sekalipun mengalami perubahan perolehan suara yang sangat signifikan dan dapat mempengaruhi citra partai politik dan dapat mempengaruhi era kepemimpinan pasca pemilihan umum tersebut.

Perilaku pemilih menjadi suatu hal yang menarik dalam politik karena pemilih dapat menjadi penentu hasil perolehan suara dalam pemilihan. Keterlibatan perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan perpolitikan yang ada, sebagian pilihan pemilih bukan karena aspirasinya sendiri tetapi ada pihak lain yang mengintervensi jatuhnya pilihan pemilih dan dalam kondisi yang berbeda pemilih terlibat penuh menyampaikan aspirasi pilihannya berdasarkan aspirasi pemilih, meski terkadang aspirasi pemilih tersebut hadir karena adanya politik uang.

Tidak menafikkan sebagai pemilih, apabila sebuah partai politik melakukan strategi marketing yang tujuannya untuk memperkenalkan identitas partai ke barisan pemilih, di era saat ini dengan cara yang menurut masyarakat menyeleweng maka citra partai politik akan hilang dengan sendirinya dihadapan masyarakat, dan menjadikan partai politik tersebut tidak layak untuk dipilih ataupun memimpin suatu daerah apabila terpilih dalam pemilihan.

Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, sebagian masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi walaupun harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik. Harus ada upaya maksimal yang harus dilakukan kembali oleh partai politik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi. Karena kualitas pemilu secara tidak langsung juga dilihat dari legitimasi pemimpin yang terpilih makin kuat dukungan rakyat semakin kuatlah tingkat kepercayaan rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar kepada hasil penjabaran pada latar belakang yang dimana pada kontestasi Pemilu Legislatif yang dilakukan di Kota Bogor terdapat perbedaan perolehan suara yang dialami oleh partai politik terkhusus pada kasus ini ialah Partai Persatuan Pembangunan, dimana dari hasil Pemilu Legislatif tersebut terdapat pergeseran pemilih dari Pemilu Legislatif 2014 kepada Pemilu Legislatif 2019 yang dalam hal ini pergeseran tersebut dikonversikan kedalam data hasil perolehan suara yang diraih oleh PPP di Kota Bogor, dari peristiwa tersebut tidak terlepas dari adanya sikap atau perilaku pemilih dari masyarakat Kota Bogor terhadap PPP Kota Bogor, dari adanya perilaku tersebut menjadi suatu hal fundamental dari adanya pergeseran atau perbedaan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif yang dialami oleh internal Partai Persatuan Pembangunan di Kota Bogor.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu daripada konteks dalam latar belakang dan telah dirumuskan kedalam rumusan masalah, dengan begitu dalam penulisan ini dapat menarik narasi pertanyaan dari bahasan yang terfokus pada peristiwa pergeseran dalam Pemilu Legislatif di Kota Bogor tersebut, pertanyaan tersebut sebagai berikut:

- 1.3.1 Faktor apa yang menjadi pengaruh perilaku pemilih di Kota Bogor dalam menciptakan pergeseran suara PPP Kota Bogor pada Pemilu Legislatif 2019?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- 1.4.1.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perolehan suara PPP dalam Pemilu Legislatif 2019 menurun.
- 1.4.1.2 Mengidentifikasi dampak perubahan perolehan suara pemilih yang dihasilkan oleh PPP dalam Pemilu Legislatif 2019.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam tujuan penelitian ini dilakukan, dalam hal ini penulis juga akan memaparkan manfaat dari adanya penelitian tentang Pergeseran Pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bogor, sebagai berikut:

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sebuah bahan dasar untuk referensi atau dalam melakukan penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengetahui tingkat

perubahan pemilih pada sebuah peserta pemilu dalam kontestasi politik seperti pemilihan umum ataupun kontestasi politik lainnya.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1.4.2.2.1 Bagi Penulis : Penelitian ini dapat menjadi sebuah sarana yang bermanfaat dalam memahami perilaku pemilih terhadap suatu partai politik dalam Pemilu Legislatif.

1.4.2.2.2 Bagi Mahasiswa : Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan teori-teori yang mempengaruhi tingkat perubahan perolehan suara partai politik dalam kontestasi Pemilu Legislatif.

1.4.2.2.3 Bagi Universitas : Dapat menjadi rujukan untuk dapat membantu menganalisa tentang pergerakan dari pemilih dalam menghadapi Pemilu Legislatif.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menjabarkan uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas tentang Pergeseran Pemilih Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Bogor dan juga berisi tentang perumusan masalah yang akan ditindaklanjuti, tujuan penelitian, dan menjabarkan manfaat dari penelitian ini serta sistematika penulisan ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan daripada referensi studi penelitian terhadap dengan garis permasalahan yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, selain itu bab ini juga meliputi daripada teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang dibahas, dan terdapat juga kerangka teori yang menggambarkan garis besar pemikiran yang dipakai sebagai dasar penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat kepada metode ilmiah penelitian yang didalamnya terdapat kepada tentang pendekatan penelitian dan cara kerja dalam melakukan penelitian, dari hal itu memuat juga kepada teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini dapat berisi tentang gambaran umum dari volatilitas atau pergeseran suara dalam Pemilu Legislatif yang dihasilkan oleh Partai Persatuan Pembangunan tahun 2014 dan 2019 serta jumlah perolehan kursi yang didapat oleh PPP pada formatur kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi daripada penjabaran dan penafsiran hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber terkait permasalahan tentang Pergeseran Pemilih Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu Legislatif 2019 serta efek atau dampak yang diterima oleh PPP Kota Bogor terakit berubahnya perolehan suara pemilih pada Pemilu Legislatif.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup daripada struktur penulisan, dalam bab ini berisi kepada kesimpulan dari hasil permasalahan tentang Pergeseran Pemilih PPP Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Bogor.

